

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan.

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD'45, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan

nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan.

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup.¹

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (*vicious cycle of poverty*).

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

¹Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”, Yogyakarta, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, No. 01, 2009, hal 56.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Provinsi Sumatra Utara, sejak dikembangkannya fokus konsentrasi terhadap parawisata Sumatra Utara hingga melahirkan Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang bertugas untuk mengatur dan memantau keadaan parawisata Danau Toba. Badan Otorita Danau Toba ini memiliki kewenangan tersendiri untuk mengembangkan daerah kawasan Danau Toba Sehingga pemerintah daerah harus terlebih dahulu meminta ijin apabila ingin melakukan pengembangan di sekitar Danau Toba. Luas wilayah yang dikelola Badan Otorita Danau Toba mencapai 30 ribu ha dan diharapkan dengan adanya badan ini dapat meningkatkan sektor parawisata dan angka jumlah total dari masyarakat miskin terus dikurangi sebagai upaya dalam peningkatan laju pertumbuhan dan arus perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut. Dimana jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba relatif masih tinggi. Hal ini dapat di lihat informasinya yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode tahun 2010-2016 (Ribu jiwa)

Tahun	Kabupaten						
	Tobasa	Samosir	Humbahas	Taput	Dairi	Karo	Simalungun
2010	17.6	19.7	18.2	34.9	26.9	38.7	87.7
2011	16.93	18.95	17.5	33.57	25.87	37.22	84.35
2012	16.64	18.4	17.25	33.09	25.49	36.71	83.09
2013	16.96	17.18	17.94	33.75	24	36.93	87.72
2014	16.51	16.27	17.14	32.23	23.35	35.36	86.25
2015	18.31	17.64	18.04	33.37	25.33	37.52	92.89
2016	18.20	18.01	18.04	32.20	24.94	38.74	92.19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2018

Pada Tabel 1.1 jelas terlihat bahwa jumlah dari penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba dari tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan tetapi pada tahun 2015 ke tujuh kabupaten tersebut serentak mengalami kenaikan dan pada tahun 2016 cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin inilah yang harus dikurangi, terlebih lagi dalam peningkatan kontribusi lapangan usaha pariwisata. Kabupaten yang termasuk dalam Badan Otorita Danau Toba yaitu Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun kedepannya diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin pada wilayah tersebut.

Pada praktiknya, ada beberapa hal diantaranya yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin pada tujuh kabupaten kawasan Danau Toba seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Semakin tinggi sumbangan dari PDRB per Kapita dan meningkatnya indeks pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah tertentu, kemudian juga indeks pengangguran pada wilayah tertentu tersebut berkurang maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

PDRB per kapita di tujuh kabupaten Kawasan Danau Toba tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat di lihat informasinya pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten						
	Tobasa	Samosir	Humbahas	Taput	Dairi	Karo	Simalungun
2010	10.176.988	8.846.032	5.864.032	5.780.955	7.593.589	9.594.214	6.812.974
2011	10.601.507	9.823.833	6.106.829	6.020.912	7.919.187	9.959.126	7.133.594

2012	22.627.824,46	17.413.335,31	16.678.319,39	14.689.627,65	17.034.206,17	27.883.731,14	22.970.279,16
2013	23.550.243,38	18.245.050,23	17.238.437,39	15.323.719,27	17.778.153,36	28.678.550,63	24.003.497,91
2014	24.390.834,08	19.234.572,44	17.987.409,54	15.960.46,78.	18.567.328,70	29.570.664,27	25.110.727,97
2015	25.327.821,78	20.226.182,27	18.617.318,35	16.596.778,49	19.397.859,67	30.495.898,68	26.258.511,15
2016	26.393.269,60	21.171.504,34	19.348.073,78	17.151.461,02	20.271.732,74	31.505.119,61	27.512.314,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2018

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB per kapita di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba pada tahun 2010 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2012 nilai PDRB per kapita Kabupaten Tobasa mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 22.627,824,46 rupiah. Kenaikan ini juga diikuti dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tobasa di tahun yang sama menjadi 16,64 ribu jiwa.

Selain PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka juga ikut mempengaruhi jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba. Dimana tingkat pengangguran terbuka di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba tiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2010-2016 (%)

Tahun	Kabupaten						
	Tobasa	Samosir	Humbahas	Taput	Dairi	Karo	Simalungun
2010	2,56	0,55	0,69	2,26	2,06	1,55	6,43
2011	2,35	2,26	3,56	3,85	2,60	4,49	4,62
2012	1,98	1,31	0,35	2,27	1,43	2,00	5,41
2013	1,69	1,12	0,30	2,34	1,90	2,08	5,56

2014	0,73	1,05	0,36	0,59	1,50	1,02	7,49
2015	3,47	1,28	1,22	2,56	1,26	2,23	5,75
2016	2,18	1,28	0,31	1,89	1,42	1,34	5,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2018

Data Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2010-2012 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tobasa berturut-turut mengalami penurunan dan pada waktu yang sama jumlah penduduk miskin di daerah tersebut juga mengalami penurunan, sedangkan di Kabupaten Humbahas pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka daerah tersebut naik menjadi 1,22 % dan pada waktu yang sama jumlah penduduk miskin di Kabupaten Humbahas naik menjadi 18.14 ribu jiwa. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka ke tujuh kabupaten kawasan Danau Toba cenderung mengalami penurunan dan pada waktu yang sama jumlah penduduk miskin juga cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin baik itu ketika mengalami penurunan dan kenaikan.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tidak hanya bergantung kepada besarnya PDRB per kapita atau kecilnya tingkat pengangguran terbuka tetapi juga perlu memperhatikan indeks pembangunan manusia di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba. Dimana indeks pembangunan manusia perlu ditingkatkan sehingga memberikan dampak yang baik kepada masyarakat tidak semata hanya menurunkan jumlah penduduk miskin tetapi juga kualitas hidup masyarakat harus ditingkatkan. Indeks pembangunan manusia di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba tiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dapat di lihat pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2010-2016 (%)

Tahun	Kabupaten						
	Tobasa	Samosir	Humbahas	Taput	Dairi	Karo	Simalungun
2010	70.90	65.14	63.40	68.43	65.91	70.36	68.80
2011	71.39	65.81	64.06	69.24	66.62	71.12	63.03
2012	71.89	66.31	64.54	69.83	66.95	71.40	69.79
2013	72.36	66.80	64.92	70.50	67.15	71.62	70.28
2014	72.79	67.80	65.59	70.70	67.91	71.84	70.89
2015	73.40	68.43	66.03	71.32	69	72.69	71.24
2016	73.61	68.82	66.56	71.96	69.61	73.29	71.48

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2018

Data Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Indeks pembangunan Manusia (IPM) di 7 kabupaten kawasan Danau Toba mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali di Kabupaten Samosir pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2.4 %. Tahun 2015 indeks pembangunan manusia yang paling besar adalah Kabupaten Tobasa sebesar 73.40% dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Samosir sebesar 65.06%. Pada tahun 2016 indeks pembangunan manusia ke tujuh kabupaten serentak mengalami kenaikan dan pada tahun yang sama juga diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di 7 kabupaten kawasan Danau Toba. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode 2005-2016”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016 ?
2. Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016 ?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016 ?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan berlatih untuk penulis untuk mempraktikkan apa yang telah penulis pelajari selama masa studi di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Sebagai referensi dan literasi terhadap penelitian lanjutan yang mungkin dikerjakan orang lain.
3. Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah, sebagai pihak yang membuat kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Alasan dan penyebab terjadinya kemiskinan secara konsep ekonomi dikenal akibat dari tidak meratanya distribusi pendapatan yang menyebabkan ketimpangan (*gap*). Kondisi inilah yang memancing juga keadaan kemiskinan dari setiap wilayah atau daerah semakin bervariasi.

Variasi dalam perubahan kemiskinan antar provinsi ini disebabkan oleh perbedaan antar provinsi dalam banyak hal, seperti laju pertumbuhan ekonomi (rendah atau tinggi) dan sifatnya (apakah padat tenaga kerja yang berarti pertumbuhan ekonomi menciptakan banyak kesempatan kerja baru atau padat modal yang berarti laju pertumbuhan kesempatan kerja lebih rendah dari pada laju pertumbuhan ekonomi), struktur ekonomi (apakah ekonomi masih bersifat agraris atau didominasi oleh sektor non-primer, khususnya industri manufaktur yang merupakan sektor terbesar dalam menyumbang nilai tambah terhadap ekonomi), kondisi infrastruktur (kuantitatif maupun kualitatif), besarnya dampak dari krisis tersebut terhadap provinsi bersangkutan (ditentukan antara lain oleh keterbukaan ekonomi dari provinsi yang bersangkutan terhadap ekonomi wilayah yang lebih luas atau internasional dan kesiapan provinsi tersebut terhadap suatu guncangan ekonomi).²

²Rahayu Simanullang, **Analisis Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri, PDRB dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba**, Medan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, Hal. 30 (Skripsi tidak diterbitkan)

Menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.³

Oleh karena itu, kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute*

³Prima Sukmaraga, **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah**. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011, hal. 21. (Skripsi dipublikasikan)

for Social Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu :

1. **Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.**
2. **Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup.**
3. **Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi⁴.**

2.1.1. Indikator Kemiskinan

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan). Kebutuhan makan digunakan ukuran/standar 2100 kalori per hari. Ekuivalensinya menurut BPS (2018) sama dengan pendapatan sekitar Rp 400,995,00 per bulan untuk warga perkotaan dan

⁴ Prima Sukmaraga, **Ibid.** hal 21.

pendapatan sebesar Rp 370.910,00 per bulan untuk warga pedesaan. Sedangkan menurut Bank Dunia (2016) menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan adalah USD \$2 per orang per hari untuk warga perkotaan dan US\$ 1 per hari bagi warga pedesaan.

2.1.2. Jenis Kemiskinan

Menurut Elvis F. Purba dkk penyebab terjadinya kemiskinan sangat beragam, tetapi kemiskinan sendiri dibagi atas empat bentuk, yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan minimum dimaksud antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.**
- b. Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.**
- c. Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.**
- d. Kemiskinan struktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan⁵.**

Fenomena Kemiskinan akan berdampak bagi arus perekonomian dan tatanan kebutuhan masyarakat, namun walaupun begitu ada pula masalah yang perlu dibahas terkait kemiskinan.

⁵Elvis F.Purba dkk, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012, hal 75-76.

Selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yang juga harus diperhatikan dalam membahas soal kemiskinan di Indonesia. Yaitu kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, terhadap batas kemiskinan (garis kemiskinan yang berlaku), sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin, atau yang makin jatuh dibawah garis kemiskinan yang berlaku.⁶

2.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah, sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

⁶Rahayu Simanullang, **op.cit.**, Hal. 46

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor- faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a.** Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembagastwasta yang tidak mencari untung.
- b.** Konsumsi pemerintah.
- c.** Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d.** Perubahan stok.
- e.** Ekspor netto.

Pada awalnya Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan suatu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana apabila Produk Domestik Regional Bruto perkapita daerah tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan daerah tersebut sangat baik karena Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang memaparkan gambaran angka yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas serta penurunan kemiskinan. Karena pada dasarnya salah satunya cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah sumbangan pendapatan yang di uraikan pada data Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) untuk setiap wilayah tertentu.

Salah satu data yang tersaji adalah data PDRB per kapita, data tersebut dapat jelas menggambarkan bagaimana jumlah pendapatan total dari masyarakat untuk setiap wilayah, jumlah total PDRB per kapita suatu wilayah akan dibagi dengan jumlah total penduduk di wilayah tersebut, data hasil nya inilah yang dinyatakan sebagai PDRB per kapita. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gambaran dari jumlah akumulasi pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah disajikan dalam data PDRB per kapita, uraian yang di dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Walaupun begitu, sumbangan yang dihasilkan dari besaran PDRB per kapita masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi lainnya dari daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB per kapita bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu

1. PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

2. PDRB atas dasar harga konstan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu.

2.3. Indeks Pembangunan Manusia

United nations development programme (2017) memberikan pengertian bahwa indeks pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan harus dianalisis serta dapat dipahami dan sudut manusia bukan hanya dari pertumbuhan manusianya. Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah :

1. **Pembangunan harus memperhatikan penduduk sebagai pusat pembangunan**
2. **Pembangunan yang dimaksudkan tersebut untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.**
3. **Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal.**
4. **Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.**
5. **Pembangunan manusia sebagai dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.⁷**

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

⁷ Inneke L. Sihombing. **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, TPAK, IPM, Terhadap Pertumbuhan Penduduk di Tujuh Kota Sumatra Utara tahun 2005-2016**. Medan, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2018. Hal 17-18. (Skripsi tidak diterbitkan)

IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.⁸

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki manfaat penting, diantaranya:

1. **IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).**
2. **IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.**
3. **Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).⁹**

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini

1. Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup;
2. Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi; dan
3. Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP).

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0 – 100 artinya semakin rendah nilai IPM suatu wilayah/negara berarti semakin lemah dan tertinggal pembangunan wilayah atau negara tersebut dan sebaliknya apabila nilai IPM suatu wilayah tinggi berarti semakin kuat dan maju pembangunan wilayah atau negara tersebut.

Berdasarkan kategorinya IPM dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu sebagai berikut :

⁸Ibid.

⁹Eka Prawiti Lumbantoruan, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Indonesia", Jakarta, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 10, No. 01, 2014, hal 14

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,0
2. Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
3. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
4. Rendah : IPM kurang dari 50,0

2.4. Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Ada hubungan sangat erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi membawa dampak yang tidak baik bagi terciptanya dan membekaknya jumlah penduduk miskin yang ada sehingga menurunkan indeks kesejahteraan rakyat.

Satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah seberapa efektif suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik. Karena pekerja suatu perekonomian adalah sumber daya utama, menjaga para pekerja tetap bekerja agar menjadi puncak perhatian para pembuat kebijakan ekonomi. Tingkat pengangguran adalah statistik yang mengukur persentase orang-orang yang ingin bekerjaketapi tidak memiliki pekerjaan.¹⁰

Sedangkan menurut Edgar O. Edwards, untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Waktu (banyak diantara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama, misal jam kerjanya per hari, per minggu, atau per bulan).

¹⁰ N. Gregory Mankiw, **Makroekonomi**, Edisi Keenam, Tejemahan Fitria Liza dan Iman Nurmawan, Jakarta : Erlangga, 2006, hal. 34.

2. **Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).**
3. **Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumberdaya-sumberdaya komplementer untuk melakukan pekerjaan).¹¹**

Berdasarkan hal-hal di atas Edgar O. Edwards memberikan bentuk-bentuk pengangguran adalah:

1. **Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.**
2. **Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.**
3. **Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.**
4. **Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.¹²**

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat.

Jumlah pengangguran menurut Badan Pusat Statistika adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

¹¹ Anggit Yoga Permana dengan judul “**Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009**”. Semarang, Universitas Diponegoro, 2012. Hal 35. (Skripsi dipublikasikan)

¹² **Ibid.**

2.4.1. Jenis Pengangguran

Macam-macam pengangguran dapat dibedakan yaitu sebagai berikut :

- 1. Pengangguran Tersembunyi**
Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.
- 2. Pengangguran Musiman**
Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

3. Setengah menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja di bawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu termasuk golongan setengah menganggur.

4. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum bekerja.¹³

2.5. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.5.1. Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Pertumbuhan tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB per kapita suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB per kapita suatu daerah berdampak pada kualitas daya beli dan konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak penduduk miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.¹⁴

¹³Sadono Sukirno, **Makro Ekonomi Teori Pengantar** edisi ketiga, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008 hal.30.

¹⁴Himawan Yudistira Dama, “**Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2005-2014**”. Manado, Universitas Sam Ratulangi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hal. 8. (Skripsi dipublikasikan)

2.5.2. Pengaruh IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

United National development Programme (2017) dalam Laporan pembangunan Manusia menyatakan antara kemiskinan dan pembangunan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

"Pada satu sisi pertumbuhan mempengaruhi pembangunan manusia melalui rumah tangga (membesarkan anak), pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan-kebutuhan dasar (makanan, obat-obatan, buku sekolah), dan pengeluaran pemerintah (prioritas pengeluaran untuk bidang sosial). Pada sisi lainnya, pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas pekerja"¹⁵

Kemiskinan dan indeks pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah, dimana peningkatan indeks pembangunan manusia menurunkan kemiskinan namun di sisi lain peningkatan jumlah penduduk miskin memungkinkan untuk menurunkan indeks pembangunan manusia.

¹⁵Irmayanti, **"Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Polewali Mandar"**. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017. Hal. 20. (Skripsi dipublikasikan)

2.5.3. Pengaruh TPT Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantarakelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber sumberlain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya induvidu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuhtetapi mereka sering masih tetap miskin.

Mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan¹⁶.

¹⁶Whisnu Adhi S, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Jawa Tengah", Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hal. 15 (skripsi tidak diterbitkan)

2.6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini.

Penelitian Anggit Yoga Permana dengan judul “ Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- a. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
- b. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
- c. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
- d. Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan¹⁷.

Penelitian Rahayu Simanullang dengan judul “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, PDRB dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba periode tahun 2005-2015”. Hasil analisis menunjukan bahwa:

- a. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
- b. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
- c. PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.¹⁸

Penelitian Sukmaraga dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- a. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
- b. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

¹⁷Anggit Yoga Permana, **Op.Cit**, hal.67

¹⁸Rahayu Simanullang, **Op.Cit**, hal.79

- c. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.¹⁹

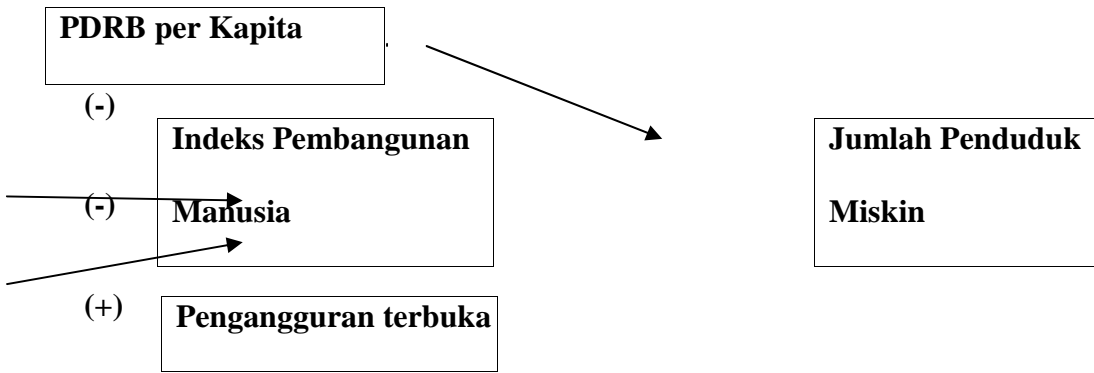
2.7. Kerangka Pemikiran

Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang senantiasa menyita perhatian, karena masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Walaupun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai. Sulitnya penyelesaian masalah ini, disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ada tiga variabel independen, antara lain PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka. PDRB per kapita adalah nilai total PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk, indeks pembangunan manusia adalah memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia dan tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan, lalu penggunaan data tersebut akan sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen akan diregresikan untuk mendapatkan tingkat signifikasinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebabnya bertambahnya jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba provinsi Sumatra Utara untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan dan menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Secara skema, kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

¹⁹ Prima Sukmaraga, **Op.Cit**, hal. 80



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8.Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016.
2. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016.
3. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba, dengan menganalisis pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin periode 2005-2016. Kemudian juga untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk miskin sebelum ketujuh kabupaten tersebut di jadikan sebagai Badan Otorita Danau Toba (BODT) dan setelah dijadikan sebagai Badan Otorita Danau Toba.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*) yang diperoleh dari beberapa lembaga dan instansi pemerintah, antara lain berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara dan Bank Indonesia serta beberapa situs website yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah :

1. Data jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto per kapita di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba 2005-2016.
3. Data indeks pembangunan manusia di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2016.
4. Data tingkat pengangguran terbuka di tujuh kabupaten kawasan danau toba periode 2005-2016.

3.3. Model Analisis

3.3.1. Metode Analisis Data Panel

Dalam penelitian ini digunakan analisis data panel, Regresi dengan menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel. Data panel adalah data yang terdiri dari data deret waktu (*time-series data*) dan *cross section data*. Keunggulan penggunaan data panel dibandingkan time series dan cross section adalah :

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah penggunaan data yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), dan memiliki variabilitas yang lebih besar atau lebih kecil, dan mengurangi kolineritas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan pendugaan yang lebih efisien.
- b. Dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja
- c. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari suatu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama disurvei dalam beberapa waktu. Dalam model data panel, persamaan model dengan menggunakan data *cross section*.

$$\ln Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{3i} + u_i; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross-section* sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah:

$$\ln Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + u_t = 1, 2, 3, \dots, T$$

Dimana t adalah banyaknya *data time-series*. Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan:

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + u_{it} \quad i = 1, 2, 3, \dots, N; t = 1, 2, 3, \dots, T$$

Dimana i merupakan banyaknya observasi, t merupakan banyaknya waktu, dan $i \times t$ merupakan banyaknya data panel. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *data time-series* pada tahun 2005-2016 dan data *cross section* tujuh kabupaten Kawasan Danau Toba periode penelitian 2005-2016.

3.4. Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model data panel dapat menggunakan beberapa metode antara lain :

3.4.1 Common Effect Model (CEM) atau Pooled Regression

Model tanpa pengaruh individu (*Common Effect*) adalah pendugaan yang menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time-series* dan *cross section* dan menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) untuk menduga parameteranya. Metode OLS merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameteranya dalam persamaan regresi linear. Secara umum persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + u_{it} \quad i = 1, 2, 3, \dots, N; t = 1, 2, 3, \dots, T$$

Keterangan:

$\ln Y$ = Jumlah penduduk miskin pada unit observasi ke- I dan waktu ke- t .

$\ln X_1$ = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita pada unit observasi ke- I dan waktu ke- t .

X_2 = Indeks Pembangunan Manusia pada unit observasi ke- I dan waktu ke- t .

X_3 = Tingkat pengangguran terbuka pada unit observasi ke- I dan waktu ke- t .

- o = Intersep dari model
- 1, 2, 3 = Slope atau koefisien variabel independen
- u_{it} = Galat atau *error term* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t .

3.4.2. Fixed Effect Model (FEM)

Salah satu kesulitan data panel adalah asumsi bahwa intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk menghasilkan hal tersebut, yang dilakukan pada panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variabel*). Pendekatan ini mengizinkan *intercept* bervariasi antar unit *cross-section* namun tetap mengasumsikan bahwa slope koefisien adalah konstan antar unit *cross-section*. Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebuah model efek tetap (*Fixed Effect Model*) atau *Least Square Dummy variable (LSDV)* model.

Model peubah *Dummy* adalah sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

$$Y = f(X, D_2, D_3, D_4, \dots, D_{16})$$

Dimana :

- $\ln Y$ = Jumlah penduduk miskin
- $\ln X_1$ = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
- X_2 = Indeks Pembangunan Manusia
- X_3 = Tingkat Pengangguran Terbuka
- i = Unit *cross section*
- t = Unit time series
- = Konstanta

0 = Intersep dari model

1, 2, 3 = Slope atau koefisien variabel independen

uit = Galat atau *error term* pada unit observasi ke-*i* dan waktu ke-*t*.

D = *Dummy*

Benchmark data lintas individu: Simalungun

Benchmark data lintas waktu: 2005

a. Lintas waktu:

$$LnY = 0 + 1D2005 + 2D2006 + 3D2007 + 4D2008 + \dots + D2016 + 1lnX1it + 2X2it + 3X3it + u_{it}$$

b. Lintas individu:

$$LnY = 0 + 1D1i + 2D2i + 3D3i + 4D4i + D5i + 1lnX1it + 2X2_{it} + 3X3it + u_{it}$$

Dimana :

D1 = 1, jika pengamatan kabupaten Toba Samosir

= 0, selainnya

D2 = 1, jika pengamatan Kabupaten Samosir

= 0, selainnya

D3 = 1, jika pengamatan Kabupaten Humbahas

= 0, selainnya

D4 = 1, jika pengamatan Kabupaten Tapanuli Utara

= 0, selainnya

D5 = 1, jika pengamatan Kabupaten Dairi

=0, selainnya

D5 = 1, Jika pengamatan Kabupaten Karo

=0, selainnya

Adapun akibat penggunaan dari *Fixed Effect Model*, atau model *LSDV* yaitu:

- a. Jika menggunakan begitu banyak peubah boneka, maka kemungkinan akan kehilangan banyak derajat bebas.
- b. Dengan variabel yang begitu banyak, ada kemungkina terjadinya multikolinearitas.
- c. Harus memperhatikan dengan hati-hati galat u_{it} pada asumsi bahwa $u_{it} \sim N(0, \sigma^2)$.
Karena indeks i menyatakan pengamatan lintas individu dan t menyatakan pengamatan lintas waktu, asumsi klasik harus dimodifikasi.

Permodelan *Fixed Effect Model* memiliki beberapa kelemahan yaitu:

- a. Masalah kekurangan derajat kebebasan (*degree of freedom*) akibat jumlah sampel yang terbatas. Sebagai contoh jika data yang dimiliki terdiri atas 10 unit *cross section* dan 5 unit *time series*, maka kita harus mengestimasi 13 variabel dummy tambahan. Rendahnya derajat kebebasan dapat menimbulkan inefisiensi pada parameter yang diestimasi.
- b. Multikolinearitas yang diakibatkan oleh banyaknya variabel dummy yang diestimasi.
- c. Keterbatasan kemampuan estimasi, terutama jika terdapat variabel yang bersifat tidak berubah berdasarkan waktu (*time invariant*).
- d. Kemungkinan korelasi di antara komponen residual spesifik (*cross section* dan *series*).

3.4.3. Model Efek Acak (*Random Effect Model*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degrees of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang didalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*fixed effect*).

Artinya, slope memiliki nilai yang tetap tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu. Model berikut ini merupakan estimasi terhadap suatu data panel dengan sebagai variabel bebasnya:

$$\text{LnY}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnX1}_{it} + \beta_2 \text{X2}_{it} + \beta_3 \text{X3}_{it} + u_i + \epsilon_{it}; t = 1, 2, 3, \dots, T; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Dimana :

LnY = Jumlah penduduk miskin

LnX1 = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

X2 = Indeks Pembangunan Manusia

X3 = Tingkat Pengangguran Terbuka

i = Unit *cross section*

t = Unit time series

= Konstanta

α = Intersep dari model

1, 2, 3 = *Slope* atau koefisien variabel independen

uit = Galat atau *error term* pada unit observasi ke-*I* dan waktu ke-*t*.

3.5. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.5.1. Uji Hausman

Uji digunakan untuk memilih model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Dalam perhitungan statistik Uji Hausman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen (termasuk konstanta) dalam model. Lebih lanjut, dalam estimasi statistik Uji Hausman diperlukan estimasi variansi *cross section* yang positif, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi maka hanya dapat digunakan model *fixed effect*. Akan tetapi apabila dalam hasil uji Chow model terbaik adalah common effect model maka Uji Hausman tidak perlu digunakan.

3.5.2. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model koefisien tetap (*common effect model*).

Hipotesis dalam Uji Chow adalah:

H_0 : Model *common effects* lebih baik daripada *fixed effects*

H_1 : Model *fixed effects* lebih baik daripada *common effects*

Statistik uji yang digunakan merupakan uji F, yaitu :

$$F = \frac{(R^2_{new} - R^2_{old}) / df}{1 - R^2_{new} / df} = \frac{(R^2_{new} - R^2_{old}) / m}{1 - R^2_{new} / (n - k)}$$

m = banyaknya peubah bebas (regresor yang baru)

k = jumlah parameter dalam model yang baru

n = jumlah pengamatan

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H₀ ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*, begitu pula sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H₀ diterima yang berarti model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

3.6. Pengujian Statistik

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatar belakangi pengujian signifikansi adalah Uji statistik (*estimator*) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H₀ dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada. Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi secara simultan (*Uji-F*), pengujian koefisien regresi secara individu (*Uji-t*), dan pengujian determinasi *Goodness of fit test (R²)*.

3.6.1. Uji Secara Individu (Uji-t)

Uji signifikansi parameter individu (*Uji-t*) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_{hitung} = \frac{\hat{S}_i - S_i}{S(\hat{S}_i)} ; i = 1,2,3$$

\hat{S}_i : Koefisien regresi

S_i : Parameter

$S(\hat{S}_i)$: Simpangan baku

Hipotesis yang digunakan:

1. Variabel bebas X_1 : PDRB per kapita

H_0 : $\beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh variable PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin.

H_1 : $\beta_1 < 0$ ada pengaruh negatif PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Variabel bebas X_2 : IPM.

H_0 : $\beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh variabel IPM terhadap jumlah penduduk miskin.

H_1 : $\beta_2 < 0$ ada pengaruh negatif variabel IPM terhadap jumlah penduduk miskin.

3. Variabel bebas X_3 : Tingkat pengangguran terbuka.

H_0 : $\beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin.

H_1 : $\beta_3 > 0$ ada pengaruh positif variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin.

3.6.2. Uji Secara Simultan (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Pada tingkat signifikansi 5% kriteria pengujian digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel secara serentak atau bersama sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.6.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil (mendekati 0) berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas (independen) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memberikan keragaman variabel terikat.

Rumus untuk mencari koefisien determinasi (R^2) adalah :

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT} \times 100\%$$

JKR : Jumlah kuadrat regresi

JKT : Jumlah kuadrat total

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggambarkan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

3.7. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1. Deteksi Normalitas

Uji kenormalan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi bahwa galat (residu *res_1*) memiliki sebaran normal atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa dalam uji t dan uji F mengasumsi bahwa nilai galat mengikuti sebaran normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak sah untuk ukuran sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan statistik.

a. Analisis Grafik

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan grafik data galat *res_1* akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika sebaran data galat normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan menguji kenormalan adalah uji statistik nonparameter, yaitu uji Kolmogorov-smirnov. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Data galat menyebar normal , H_1 : Data galat tidak menyebar normal

3.7.2. Deteksi Multikolinearitas

Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara semua atau beberapa variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear. Tetapi perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi. Multikolinearitas dalam penelitian ini dideteksi dengan melihat : Matrix koefisien antara masing masing variabel bebas. Kaidah yang digunakan adalah apabila koefisien korelasi antara dua variabel bebas lebih besar 0,8 maka kolinearitas merupakan masalah berganda merupakan masalah yang serius. Namun korelasi pasangan ini tidak memberikan informasi yang lebih baik dalam untuk hubungan yang rumit antara tiga atau lebih peubah.

3.7.3. Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksirnya secara PLS (*panel least square*). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *panel least square* yang terjadi dalam program Eviews 8. Uji ini diterapkan pada hasil regresi yang menggunakan prosedur equation dan metode PLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dalam uji ini adalah nilai signifikan (*probability*) dari tabel uji heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikan (*probability*) lebih besar dari 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas pada model, demikian sebaliknya.

3.8. Defenisi Operasional Variabel

1. Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi standar hidup minimum mereka di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba yang dinyatakan dalam satuan jiwa/tahun.
2. Produk regional per kapita atau PDRB per kapita adalah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba yang dinyatakan dalam rupiah/tahun.
3. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba yang dinyatakan dalam satuan persen/tahun.
4. Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba yang dinyatakan dalam satuan persen/tahun.

